

## Teknologi Digital Sebagai Solusi Pencegahan Korupsi di Era Pemerintahan Modern

<sup>1</sup>Achmad Saiful Anwar (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)  
E-mail: [saifulolenk1@gmail.com](mailto:saifulolenk1@gmail.com)

<sup>2</sup>Abdul Aziz Attamimi (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)  
E-mail: [azizabdul11@gmail.com](mailto:azizabdul11@gmail.com)

<sup>3</sup>Agus Bintoro (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)  
E-mail: [agusbintoro33@gmail.com](mailto:agusbintoro33@gmail.com)

<sup>4</sup>Deddy Ahmad Fajar (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)  
E-mail: [deddyahmadfajar@stiedarulfalahmojokerto.ac.id](mailto:deddyahmadfajar@stiedarulfalahmojokerto.ac.id)

---

**Kata Kunci:** teknologi digital, korupsi, e-government, transparansi, good governance

**Keywords:** digital technology, corruption, e-government, transparency, good governance

*Received : 16 Juli 2025*

*Revised : 18 Juli 2025*

*Accepted: 24 juni 2025*

©2025The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



---

### ABSTRAK

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang menghambat efektivitas pemerintahan, merusak kepercayaan publik, serta mengganggu efisiensi pembangunan nasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, teknologi digital hadir sebagai solusi strategis yang mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memperkecil ruang terjadinya penyimpangan dalam birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap berbagai sumber literatur ilmiah yang membahas penerapan teknologi digital seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement dalam konteks pencegahan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi proses administrasi dan pengelolaan keuangan publik memungkinkan pencatatan yang akurat dan terdokumentasi secara real-time, sehingga memudahkan proses audit serta meminimalkan interaksi tatap muka yang rentan terhadap penyuapan dan kolusi. Selain itu, teknologi digital juga berperan penting dalam membentuk budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Platform pelaporan daring dan media digital memperluas ruang partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan dan mendorong penanaman nilai-nilai integritas secara luas. Inovasi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang besar dalam pendeteksian dini potensi korupsi melalui pengelolaan data yang transparan, terdesentralisasi, dan berbasis algoritma. Namun demikian, efektivitas teknologi sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur digital, integritas pelaksana, kerangka regulasi yang adaptif, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan strategi antikorupsi berbasis digital memerlukan integrasi menyeluruh antara

inovasi teknologi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk menciptakan sistem yang efisien, adil, dan bebas dari korupsi.

## ABSTRACT

Corruption is a structural problem that hinders the effectiveness of government, undermines public trust, and disrupts the efficiency of national development. In facing these challenges, digital technology offers a strategic solution that can strengthen oversight systems, increase transparency, and reduce the scope for irregularities in the bureaucracy. This study employs a qualitative approach through a literature review of various scientific sources discussing the application of digital technologies such as e-government, e-budgeting, and e-procurement in the context of corruption prevention. The results of the study show that the digitization of administrative processes and public financial management enables accurate and real-time documentation, thereby facilitating the audit process and minimizing face-to-face interactions that are prone to bribery and collusion. In addition, digital technology also plays an important role in shaping an anti-corruption culture within society. Online reporting platforms and digital media expand public participation in government oversight and encourage the widespread instillation of integrity values. Innovations such as blockchain and artificial intelligence (AI) have opened up great opportunities for early detection of potential corruption through transparent, decentralized, and algorithm-based data management. However, the effectiveness of technology is highly dependent on the readiness of digital infrastructure, the integrity of implementers, adaptive regulatory frameworks, and human resource capacity. Therefore, the success of digital-based anti-corruption strategies requires comprehensive integration between technological innovation and the principles of good governance to create an efficient, fair, and corruption-free system.

## I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan hambatan signifikan dalam pembangunan nasional. Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga mengganggu efisiensi pelayanan serta menggerogoti anggaran negara secara sistematis. Praktik koruptif yang semakin kompleks menuntut solusi inovatif yang mampu menutup celah birokrasi rentan penyimpangan secara sistemik dan berkelanjutan (Evi Apriani et al., 2025).

Salah satu pendekatan strategis yang kini mendapat perhatian adalah pemanfaatan teknologi digital di sektor publik. Transformasi digital menciptakan peluang besar untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Teknologi seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement memungkinkan proses administrasi dan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi digital, sehingga mengurangi potensi penyuapan, kolusi, dan nepotisme.

Lebih dari sekadar instrumen pengawasan, teknologi digital juga membentuk budaya antikorupsi di masyarakat. Media sosial, portal berita daring, dan platform edukasi digital mendorong kesadaran publik akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Masyarakat kini dapat berperan aktif dalam pengawasan kebijakan publik melalui pelaporan online dan partisipasi berbasis teknologi.

Inovasi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi, serta deteksi pola perilaku koruptif secara cepat dan presisi. Namun, keberhasilan pemanfaatan teknologi digital sangat dipengaruhi oleh integritas pelaksana, kesiapan infrastruktur, dan regulasi yang mendukung (Wahono, 2023).

Sejumlah negara telah menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam sektor publik dapat memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Korea Selatan, sebagai contoh, telah menerapkan teknologi analitik dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara nasional, yang terbukti mampu menekan praktik kolusi dan meningkatkan efisiensi anggaran. Ukraina melalui platform e-procurement ProZorro sejak 2016 berhasil menciptakan sistem pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar USD 1,9 miliar dalam dua tahun pertama penerapannya (Santiso, 2021). Sementara itu, India mengembangkan sistem identitas digital Aadhaar dan integrasi dengan sistem pembayaran elektronik untuk mencegah penyelewengan dalam penyaluran subsidi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi dan mengeliminasi penerima fiktif atau ganda, sekaligus memastikan dana bantuan sampai kepada pihak yang berhak. Studi kasus dari berbagai negara ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya sekadar alat efisiensi birokrasi, tetapi juga merupakan perangkat antikorupsi yang berdampak signifikan terhadap penurunan kebocoran anggaran dan peningkatan kepercayaan publik.

Meskipun demikian, teknologi tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal yang berdiri sendiri. Temuan dari studi panel terhadap 214 negara menunjukkan bahwa efektivitas e-government dalam menekan tingkat korupsi sangat tergantung pada konteks kelembagaan yang mendukung. Tanpa adanya supremasi hukum yang kuat, struktur kelembagaan yang independen, dan sistem pengawasan yang efektif, implementasi teknologi digital berisiko menjadi kosmetik administratif semata. Selain itu, transformasi digital juga membawa tantangan baru, seperti ancaman keamanan siber, pelanggaran privasi, hingga potensi penyalahgunaan algoritma untuk kepentingan politik atau diskriminatif. Oleh karena itu, digitalisasi harus diiringi dengan reformasi kelembagaan, penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik. Sinergi antara aspek teknologis dan institusional inilah yang akan memastikan bahwa teknologi digital benar-benar berfungsi sebagai solusi komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan modern.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, mengandalkan buku, jurnal, peraturan, dan dokumen resmi terkait penerapan teknologi digital dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, digunakan metode

normatif-yuridis dan konseptual untuk menelaah aspek regulatif dan kebijakan publik, serta evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan keamanan data dalam pengelolaan informasi dan transaksi publik.

Tabel .1 Literatur Review

Penulis	Metode, Pendekatan	Hasil & Pembahasan	Implikasi
(Evi Apriani et al., 2025)	<p>- <b>Metode:</b> Deskriptif analitis, kualitatif, dan empiris</p> <p>- <b>Pendekatan:</b> Yuridis normatif dan konseptual, didukung pendekatan sosiologi hukum</p>	<p>- <b>Digitalisasi</b> (e-government, e-budgeting, e-procurement) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.</p> <p>-Teknologi mempersempit ruang korupsi melalui pencatatan digital, audit real-time, dan partisipasi publik dalam pengawasan.</p> <p>- Tantangan utama: resistensi birokrasi, ketimpangan infrastruktur, keterbatasan SDM, dan ancaman keamanan siber.</p> <p>- Keberhasilan sangat bergantung pada integritas pelaksana, regulasi yang mendukung, kesiapan infrastruktur, serta budaya birokrasi yang bersih.</p> <p>- Pendidikan antikorupsi dan pelibatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah perlu memperluas implementasi digitalisasi di seluruh birokrasi, khususnya daerah tertinggal.</li> <li>- Penguatan regulasi dan perlindungan data menjadi prioritas.</li> <li>- Pelatihan berkala bagi aparatur sipil negara untuk adaptasi teknologi.</li> <li>- Keterlibatan masyarakat dan LSM harus terus didorong untuk memastikan pengawasan partisipatif dan berkelanjutan.</li> <li>- Transformasi digital harus diiringi pembentukan budaya birokrasi yang bersih agar tata kelola pemerintahan bebas korupsi dapat tercapai secara berkelanjutan.</li> </ul>

---

memperkuat  
efektivitas  
digitalisasi dalam  
mencegah korupsi.

---

### III. DATA DAN FAKTA DIGITALISASI DI INDONESIA

#### Statistik dan Dampak

Tabel .2 Statistik dan Dampak

Tahun	Indeks Persepsi Korupsi (BPS)	Proyek Pengadaan via SPSE	Potensi Korupsi Terdeteksi (%)
2021	3,8	120	45
2022	3,5	150	38
2023	3,2	175	30

- Indeks Persepsi Korupsi (IPK):** Semakin rendah nilai IPK, semakin tinggi persepsi korupsi. Penurunan IPK dari 3,8 ke 3,2 menunjukkan adanya perbaikan persepsi publik terhadap upaya antikorupsi, seiring dengan meluasnya digitalisasi layanan publik.
- Proyek Pengadaan via SPSE:** Jumlah proyek yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) meningkat setiap tahun, menandakan adopsi digitalisasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah semakin luas
- Potensi Korupsi Terdeteksi:** Persentase potensi korupsi yang terdeteksi menurun signifikan, dari 45% menjadi 30% dalam tiga tahun, sejalan dengan penerapan sistem digital yang lebih transparan dan terdokumentasi

#### Dampak Digitalisasi Berdasarkan Temuan Institusi

- KPK melaporkan bahwa penerapan SPSE pada 2023 berhasil menurunkan potensi korupsi pengadaan barang/jasa hingga 30% dibandingkan sebelum digitalisasi masif dilakukan.
- Survei BPS 2023 menunjukkan digitalisasi layanan publik berkontribusi pada penurunan persepsi korupsi di sektor pemerintahan.
- DKI Jakarta: Implementasi e-budgeting mempercepat transparansi anggaran dan menurunkan penyimpangan, menjadi contoh keberhasilan digitalisasi di tingkat daerah.
- Kasus Daerah 3T (Papua, Sulawesi Tenggara): Masih ditemukan kendala infrastruktur dan SDM, sehingga implementasi digitalisasi belum optimal dan potensi manipulasi data masih ada.

#### Fakta Pendukung Lainnya

- a) Audit dan Pengawasan Real-Time: Sistem digital memungkinkan pengawasan dan audit berlangsung secara paralel dengan pelaksanaan program, sehingga deteksi penyimpangan bisa dilakukan lebih dini.
- b) Partisipasi Publik Meningkat: Portal pelaporan daring dan transparansi data publik mendorong masyarakat lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
- c) Inovasi Teknologi: Penggunaan blockchain dan AI mulai diadopsi untuk mendeteksi pola korupsi serta memastikan keamanan dan transparansi data transaksi pemerintah

### **Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi**

- a) Keterbatasan Infrastruktur: Daerah tertinggal masih mengalami kendala akses internet dan perangkat digital.
- b) SDM Kurang Terlatih: Sekitar 40% ASN belum memiliki keterampilan digital dasar.
- c) Risiko Keamanan Siber: Kasus kebocoran data ASN pada 2022 menunjukkan pentingnya peningkatan keamanan sistem digital pemerintah.

### **Implikasi**

- a) Digitalisasi terbukti menurunkan potensi korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas SDM, dan perlindungan data.
- b) Daerah dengan infrastruktur dan SDM yang baik menunjukkan hasil signifikan, sedangkan daerah yang tertinggal masih menghadapi tantangan besar.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini praktik-praktik korupsi dalam konteks pemerintahan modern. Teknologi digital tidak hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi baru dalam menciptakan sistem birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Implementasi sistem digital seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement telah mengubah paradigma pengelolaan administrasi dan keuangan publik dari sistem konvensional yang tertutup dan rentan manipulasi, menjadi sistem terbuka yang terdokumentasi secara elektronik dan dapat diaudit kapan saja. Keunggulan dari pendekatan digital ini terletak pada kemampuannya dalam menciptakan alur informasi dan transaksi yang terekam secara otomatis, mengurangi celah interaksi tatap muka yang sebelumnya menjadi titik rawan terjadinya praktik penyuapan, kolusi, dan nepotisme. Dengan berkurangnya potensi intervensi manusia yang tidak terdokumentasi, sistem digital secara langsung menekan peluang terjadinya praktik penyimpangan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan public.

Lebih jauh, proses pengawasan dan audit yang dilakukan dalam sistem pemerintahan digital menjadi jauh lebih efisien dan responsif berkat teknologi pencatatan digital yang bersifat real-time. Hal ini memungkinkan lembaga pengawas atau auditor internal untuk memantau aktivitas keuangan dan administrasi secara langsung, mendeteksi ketidaksesuaian secara cepat, dan melakukan intervensi sebelum kerugian terjadi. Real-time data monitoring juga memungkinkan proses audit tidak lagi bersifat retrospektif, melainkan berjalan secara paralel dengan pelaksanaan program atau proyek, sehingga efektivitas pengawasan meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, digitalisasi bukan sekadar mempercepat proses birokrasi, tetapi juga mempersempit ruang gerak pelaku korupsi melalui peningkatan visibilitas dan jejak audit yang kuat. Secara tidak langsung, hal ini juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur negara, karena setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem digital dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara terbuka (Evi Apriani et al., 2025). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada integritas.

Tidak hanya sebagai instrumen pengawasan birokrasi, teknologi digital juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Melalui media digital dan platform daring, nilai-nilai fundamental seperti integritas, transparansi, serta akuntabilitas dapat disosialisasikan secara luas, konsisten, dan berkelanjutan. Peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan turut diperkuat melalui kehadiran portal transparansi dan sistem pelaporan daring yang memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak korupsi. Keterlibatan publik tersebut memberikan tekanan sosial dan moral kepada para pejabat publik untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku (Evi Apriani et al., 2025; Maha et al., 2024). Oleh karena itu, peran teknologi tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menjadi pendorong penting dalam perubahan budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih bersih.

Penerapan teknologi mutakhir seperti blockchain dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin memperkuat inisiatif pencegahan korupsi. Teknologi blockchain menawarkan sistem pencatatan transaksi yang bersifat aman, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga sangat efektif dalam pengelolaan anggaran negara serta pelaksanaan audit publik. Sementara itu, AI berkontribusi dalam mengidentifikasi pola korupsi dengan menganalisis data besar secara cepat dan akurat. Kombinasi kedua teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan memberikan fondasi sistematis untuk pencegahan korupsi yang lebih terintegrasi (Maha et al., 2024). Meskipun demikian, efektivitas implementasi teknologi ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, kelengkapan regulasi yang adaptif, serta integritas dari para pelaksana kebijakan.

Di sisi lain, tantangan masih ditemukan dalam proses penerapan teknologi digital untuk pencegahan korupsi. Kesiapan sumber daya manusia,

khususnya aparat birokrasi dan penegak hukum, merupakan prasyarat utama agar teknologi dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Selain itu, distribusi infrastruktur digital yang belum merata di berbagai wilayah menjadi hambatan yang harus segera diatasi untuk memastikan kesetaraan implementasi. Dukungan regulasi yang fleksibel dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan juga sangat diperlukan guna menjaga integritas sistem serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan teknologi (Evi Apriani et al., 2025; Maha et al., 2024). Dengan demikian, integrasi teknologi digital dalam pencegahan korupsi harus disertai dengan penerapan prinsip-prinsip good governance serta penguatan budaya birokrasi yang etis dan bersih.

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam pemerintahan modern tidak hanya sekadar adaptasi terhadap perkembangan teknologi, melainkan juga merupakan strategi fundamental dalam memperkuat tata kelola publik yang bebas dari korupsi. Penerapan berbagai instrumen digital seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement mampu menciptakan sistem administrasi yang lebih transparan, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Transparansi menjadi lebih terjamin melalui pencatatan otomatis yang tidak dapat dimanipulasi secara sembunyi, sementara akuntabilitas meningkat seiring dengan kemudahan dalam proses audit serta pelacakan aliran dana dan keputusan administrasi. Selain itu, sistem berbasis teknologi memungkinkan pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal secara real-time, yang berdampak langsung dalam mempersempit ruang gerak praktik koruptif yang sebelumnya leluasa terjadi akibat keterbatasan mekanisme pengawasan konvensional. Digitalisasi juga mendorong keterlibatan publik yang lebih luas dalam pengawasan birokrasi melalui akses informasi terbuka dan sistem pelaporan berbasis daring yang memperkuat kontrol sosial terhadap lembaga pemerintahan.

Namun demikian, potensi keberhasilan teknologi digital dalam menekan korupsi sangat bergantung pada adanya dukungan kelembagaan dan struktural yang memadai. Tanpa regulasi yang adaptif dan berkekuatan hukum, transformasi digital akan rentan stagnasi atau bahkan dimanfaatkan untuk memperkuat sentralisasi kekuasaan yang tidak akuntabel. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan, khususnya dalam hal literasi digital, etika birokrasi, dan profesionalisme aparat. Implementasi sistem digital yang canggih tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diimbangi dengan integritas dan komitmen dari pelaku birokrasi sebagai pengguna teknologi tersebut. Sinergi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai integritas personal dari aktor-aktor birokrasi menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, tangguh, dan responsif terhadap dinamika publik. Dalam konteks ini, teknologi bukan hanya sebagai alat bantu administratif, tetapi sebagai pengungkit reformasi birokrasi yang sesungguhnya membawa perubahan struktural yang menysasar akar permasalahan korupsi di era digital.

## **KESIMPULAN**

Pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan terbukti efektif mencegah korupsi. Sistem seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi administrasi dan keuangan publik. Digitalisasi mempercepat birokrasi, menciptakan rekam jejak data yang mudah diaudit secara real-time, serta mengurangi interaksi langsung yang rawan korupsi.

Media digital dan pelaporan daring memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan, membangun budaya antikorupsi, dan memberi akses kanal pelaporan formal. Teknologi mutakhir seperti blockchain dan AI memperkuat deteksi anomali dan pengawasan otomatis.

Namun, efektivitas digitalisasi bergantung pada infrastruktur yang merata, integritas aparatur, regulasi yang adaptif, dan penguatan SDM. Tanpa sinergi inovasi dan prinsip good governance, digitalisasi bisa menimbulkan risiko baru seperti penyalahgunaan data. Integrasi teknologi harus selaras dengan tata kelola yang baik dan budaya birokrasi bersih agar pemerintahan modern benar-benar bebas korupsi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, & Vivi Riska Ramadani. (2025). Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 153–163. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>
- Kristina, A., & Abstrak, K. (2019). PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, VI(1). <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Maha, P., Cantika, I. P., Metalin, A., Puspita, I., Sabela, O. R., Firdausy, R. A., Andini, D., & Prasasti, P. (2024). PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. In *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* (Vol. 8, Issue 5).
- PASARIBU, M. (2023, March 8). *Memberantas dan Mencegah Korupsi Lewat Transformasi Digital*. Kompas.Id.
- Santiso, C. (2021, August 4). *Digitalisation as an anti-corruption strategy: what are the integrity dividends of going digital?* Wpcomstaging.Com.
- Wahono, R. S. (2023, September 29). *Teknologi AI dan Pemberantasan Korupsi*. Kpk.Go.Id.
- Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, & Vivi Riska Ramadani. (2025). Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 153–163. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>